

ABSTRAK

Ketentuan tentang Jabatan Notaris diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pada Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN menyatakan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan. Dalam menghadapi persoalan hukum, Notaris membutuhkan suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi dan masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga tepat sekali kalau Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi suatu organisasi yang mempunyai kesinambungan dalam melaksanakan pengawasan, bimbingan dan perlindungan hukum bagi notaris.

Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya, untuk menganalisis kendala dan solusinya perlindungan hukum terhadap notaris yang dijadikan sebagai tersangka dalam menjalankan tugas jabatannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat.

Hasil Penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa sebelum notaris diseret keranah hukum pidana dengan kasus memberikan keterangan palsu, penyidik harus tahu apa duduk perkara dari kasus tersebut. Karena ketidakhati-hatian notaris bisa menjadikan notaris sebagai tersangka. Notaris dalam menjalankan tugasnya hanya bersifat formil dan hanya mengkonstantir keinginan para pihak yang kemudian dituangkan kedalam akta. Karena ada salah satu pihak yang dirugikan dalam permasalahan tersebut dan notaris diminta oleh penyidik untuk memperlihatkan akta tersebut dan ini menyangkut kepentingan umum serta mendapatkan izin dari MKN, maka Pasal 16 ayat (1) huruf f dan Pasal 54 UUJN tentang merahasiakan jabatan dapat dikesampingkan karena terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan notaris memberikan keterangan sehingga noataris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum yang diberikan MKN kepada Notaris yaitu jika akan melakukan penyidikan atau pemanggilan kepada Notaris harus minta izin terlebih dahulu kepada MKN, harus berkoordinasi dengan organisasi INI atau Notaris senior yang berkompeten.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tersangka, Jabatan Notaris

ABSTRACT

The provisions regarding the position of a notary are regulated in law number 30 of 2004 concerning the position of a notary (hereinafter referred to as UUJN). In article 16 paragraph (1) letter (e) of UUJN states that a notary is obliged to keep all information obtained in order to make deeds in accordance with oaths or appointments. In dealing with legal issues, the notary requires an organization that can accommodate the aspirations and problems it faces, so it is appropriate that Indonesian notary ties (INI) become an organization that has continuity in carrying out supervision, guidance and legal protection for notaries.

The purpose of the study was to analyze legal protection against a notary who was made a suspect in carrying out his office duties, to analyze constraints and legal protection solutions against a notary who was made a suspect in carrying out his office duties.

The method used in this study is an empirical juridical method that is a legal research method that seeks to see the law in terms that are real or can be seen seeing, examining how the law works in the community.

The results of this study finally gave an answer that before the notary was dragged into the criminal law with a case of giving false information, the investigator had to know what the case was from the case. Because not careful notary can make a notary as a suspect. The notary in carrying out this duties is only formal and only constricts the wishes of the parties which are then poured into the deed. Because there is one of the disadvantaged parties in the problem and the notary is asked by the investigator to show the deed and this is to carry public interest and get permission from MKN, then article 16 paragraph (1) letter f and article 54 of the UUJN concerning the confidentiality of office can be ruled out because higher interests that require a notary to provide information so that the notary is exempt from his oath according to the applicable laws and regulations. Legal protection given by the MKN to the Notary must ask permission in advance to MKN, must coordinate with the INI organization or a competent senior Notary.

Keywords : Legal Protection, Suspect, Notary Office